

TESIS

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT TERKAIT
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

(Studi Kasus :Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor Pts.04/B/MPPN/VII/2017)”

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Kenotariatan**

OLEH :

NURI APRILIANI

1720122030



Dr. BUSYRA AZHERI, S.H., M.H

Pembimbing I

Dr. DELFIYANTI, S.H., M.H

Pembimbing II

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

MAGISTER KENOTARIATAN

2019

ABSTRAK

Nuri Apriliani. 1720122030. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Halaman 115. Tahun 2019

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Tujuan lain dari pengawasan tersebut agar notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan dapat melayani kepentingan masyarakat dengan baik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan penjatuhan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan, apakah akibat hukum bagi notaris dengan adanya putusan Majelis Pengawas, dan bagaimanakah pelaksanaan putusan majelis pengawas pusat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Barat Nomor Pts.02/MPWA/SBR/2016. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan dilakukan juga pendekatan secara yuridis empiris. Sumber data yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan Informasi dengan mempergunakan pedoman wawancara dan observasi lapangan. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dengan adanya putusan Majelis Pengawas yakni Notaris terlapor telah diberikan sanksi berupa sanksi administratif dalam bentuk teguran tertulis dan usulan pemberhentian sementara, namun Notaris terlapor melakukan upaya hukum banding, Majelis Pengawas Pusat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris telah mengeluarkan putusan menolak permohonan banding Pembanding/Terlapor, menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat Nomor PTS.02/MPWN/SBR/2016.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Putusan Majelis Pengawas, Pelanggaran dan Notaris.

ABSTRACT

Nuri Apriliani. 1720122030. Notary Public Master Program at Andalas University Law School. Page 115. In 2019

The Notary supervisory board is the only agency authorized to supervise, examine and impose sanctions on the notary. Another purpose of the supervision is so that the notary in carrying out his position can carry out his duties properly in accordance with the applicable laws and regulations, with the aim of serving the interests of the community well. The problem in this thesis is how is the setting of sanctions for notaries who violate the law and regulations, what are the legal consequences for the notary with the decision of the supervisory board, how is the implementation of the decision of the central supervisory board related to violation committed by the notary in the case of the notary public number Pts.02/MPWA/SBR/2016. The method used in this thesis is normative juridical and an empirical juridical approach is also carried out. Data sources namely primary, secondary and tertiary legal materials are obtained through library research and information using interview guides and field observations. From the research conducted, it was obtained the result that the regulation regarding the imposition of sanctions for notaries who violated the laws and regulations has been stipulated in law number 2 of 2014 concerning the position of notary, regulation of the minister of law and human rights of the republic number M.02.PR.08.10 of 2004 concerning the procedures for examining the notary supervisory board and the decision of the minister of law and human rights of the republic number M.39-PW.07.10 years 2004 concerning guidelines for carrying out the duties of the notary supervisory board. With the decision of the supervisory board, the reported notary has been given sanctions in the form of administrative sanctions in the form of written warnings and proposals for temporary dismissals, but the notary reportedly filed an appeal, the central supervisory board regarding the violations committed by the notary has issued a decision rejecting the appeal appeal strengthen the verdict of the territory of the west sumatera provincial notary assembly number PTS.02/MPWN/SBR/2016.

Keywords: Juridical analysis, decision of the supervisory board, Violation and Notary.